

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN FAKFAK  
(Studi Kasus Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan)  
TAHUN 2024**

**Marthen Anthon Pentury<sup>1</sup>, Ade Irma Yani<sup>2</sup>**

**<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fakfak  
<sup>1</sup>pentury88@gmail.com**

**Abstract**

This study aims to analyze the effectiveness of the development of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) in the Planning and Finance Division of the Fakfak Regency Secretariat. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through questionnaires administered to 15 informants, observations, and interviews. The results of the study show that time effectiveness is categorized as quite good (63.34%), but labor effectiveness is still low (15%) due to a lack of leadership commitment and human resource competence. Overall, the development of SAKIP is underway but is not yet optimal because it is still focused on the planning and measurement stages.

Keywords: Effectiveness, SAKIP Development, Performance Accountability.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 15 informan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas waktu dikategorikan cukup baik (63,34%), namun efektivitas tenaga masih rendah (15%) karena kurangnya komitmen pimpinan dan kompetensi SDM. Secara keseluruhan, penyusunan SAKIP sudah berjalan namun belum optimal karena masih terfokus pada tahap perencanaan dan pengukuran.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyusunan SAKIP, Akuntabilitas Kinerja.

**Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya merupakan proses dinamis yang dilakukan oleh negara untuk mengatur, mengelola, dan melayani kepentingan masyarakat demi tercapainya tujuan nasional. Dalam perspektif modern, pemerintahan tidak lagi dipandang sebagai pemegang otoritas tunggal yang bersifat instruktif, melainkan sebagai fasilitator yang menggerakkan seluruh potensi bangsa. Inti dari eksistensi pemerintahan adalah pelayanan publik dengan sebuah komitmen untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dan memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan. Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat di era keterbukaan informasi, paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser dari model birokrasi tradisional menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Transformasi ini menekankan bahwa pemerintah tidak hanya dinilai dari

seberapa besar anggaran yang dihabiskan (*input*), tetapi lebih kepada seberapa besar manfaat dan dampak nyata (*outcome*) yang dirasakan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas mensyaratkan adanya sinergi antara aspek transparansi, partisipasi publik, dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas tidak lagi diukur hanya dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat. Pemerintahan yang berkualitas menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang harus disejahterakan melalui pelayanan publik yang prima, aksesibel, dan berkeadilan. Ciri utama pemerintahan yang berkualitas adalah adanya keselarasan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dicapai. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran negara harus bertransformasi menjadi nilai tambah yang nyata. Dalam konteks ini, kualitas pemerintahan tercermin dari kemampuan instansi untuk meminimalisir pemborosan (*inefficiency*) dan memastikan bahwa program kerja bersifat strategis, tepat sasaran, serta memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Guna menyeleraskan antara perencanaan dengan hasil yang dicapai dalam tata kelola suatu pemerintahan yang baik dan benar, perlu adanya sebuah kebijakan yang mampu mengakomodir semua kepentingan pemerintah guna mampu melayani kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana dalam pasal 2-4 aturan tersebut, penyelenggaraan SAKIP bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga secara berjenjang tetapi diselenggarakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Penyusunan rencana strategis untuk periode 5 (lima) Tahun menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP oleh Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD/OPD.

Penyelenggaraan SAKIP melalui penyusunan rencana strategis selaras dengan apa yang dikatakan oleh Nani, dkk (2021 ; 103) bahwa untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik dan berorientasi hasil, maka pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan hasil yang jelas berupa kondisi yang ingin diwujudkan, menentukan indikator kinerja keberhasilannya yang dapat diukur dan relevan. Selanjutnya, menentukan target dari tiap indikator yang digunakan dengan mempertimbangkan harapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah harus pula membangun budaya organisasi yang berorientasi kinerja. Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak raih penghargaan Akuntabilitas Kinerja dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Ajang SAKIP Award (*primarakyat, Oktober 2024*).

Kabupaten Fakfak mendapat predikat nilai “B” dan Pj. Bupati Fakfak ketika itu mengatakan bahwa predikat nilai B adalah hasil dari perjuangan panjang dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Fakfak (termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak), bahkan Beliau berharap kedepan Kabupaten Fakfak dapat meraih nilai lebih tinggi yakni BB, B+, atau nilai paling tinggi adalah A/AA. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Fakfak telah memiliki sistem akuntabilitas kinerja yang memadai, namun masih memerlukan sedikit perbaikan pada beberapa aspek, artinya fondasi sistem akuntabilitas sudah terbentuk dengan baik, namun tantangannya adalah bagaimana menggunakan data kinerja tersebut untuk melakukan efisiensi anggaran dan perbaikan layanan secara nyata, bukan sekadar menggugurkan kewajiban laporan.

Fenomena di atas, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SAKIP itu bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak secara keseluruhan tapi sangatlah

tergantung pada kesiapan dan pelaksanaan SAKIP oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Secara teoritis, Pemerintahan daerah (self government) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan) mengambil kebijakan, dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi (Nurcholis, 2005 ; 20). Hal inilah yang mejadi fokus penelitian penulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penyelenggaraan SAKIP pada Kantor Sekretariat Daerah di Kabupaten Fakfak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum dan atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif, setelah data dari seluruh responden terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan analisis data dengan tahapan : mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data, menyajikan data, melakukan perhitungan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Hikmawati, 2020 ; 88).

Pengumpulan data terkait penyelenggaraan SAKIP di Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak diperoleh dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipilih juga responden dalam penelitian ini. Upaya untuk memperoleh data dan pengukuran data dalam sebuah penelitian, diperlukan instrumen dan teknik pengumpulan data dan instrumen itu sendiri adalah alat yang dipakai untuk mengukur fenomena sosial yang terjadi sehingga instrumen utama dalam suatu penelitian adalah peneliti itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, kuesioner, Wawancara.

Selanjutnya untuk menganalisis data, penulis menggunakan tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, dalam Subarsono (2011:16) yang adalah sebagai berikut : 1). Pengumpulan data, yaitu peneliti dapat mengumpulkan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian dan kemudian dilengkapi dengan hasil pencarian selanjutnya. 2). Tahap reduksi data, merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data. 3). Tahap penyajian data, merupakan data yang diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. 4). Tahap Penarikan Kesimpulan, merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian.**

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak dengan melibatkan 15 orang informan dari Bagian Perencanaan dan Keuangan. Mayoritas informan (73,34%) berada pada rentang usia produktif 41–50 tahun dengan komposisi jenis kelamin 60% laki-laki dan 40% perempuan. Berdasarkan pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, dan wawancara, hasil penelitian diuraikan berdasarkan tiga indikator utama efektivitas dengan hasil sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Informan Terhadap 3 (Tiga) Indikator) Utama Efektivitas

No	Indikator	Iya	Jarang	Tidak	Kategori
1	Efektivitas Waktu	63.34%	18.33%	18.33%	Cukup Baik
2	Efektivitas Tenaga	15%	20%	65%	Kurang Baik
3	Hasil yang Diperoleh	100%	0%	0%	Sangat Baik

Sumber : Data Primer (Diolah, 2025).

Data dan informasi diatas, menunjukkan bahwa **Indikator Efektivitas Waktu** dalam penyusunan SAKIP secara keseluruhan, dikategorikan **Cukup Baik** dengan persentase 63,34%. Namun, dalam hal pemahaman umum, hanya 20% pegawai yang benar-benar memahami SAKIP secara mendalam, sementara sisanya menyatakan jarang atau tidak tahu karena fokus pada TUPOKSI masing-masing. **Indikator Efektivitas Tenaga**, indikator ini menunjukkan capaian yang **Kurang Baik** dengan rata-rata jawaban "Iya" hanya sebesar 15%, sementara 65% responden menjawab "Tidak", dimana pegawai merasa SDM yang tersedia belum mampu sepenuhnya digunakan dalam penyusunan SAKIP karena tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknis tersebut. Selain itu, rata-rata sebagian informan menyatakan bahwa tidak semua pegawai dilibatkan atau ditugaskan dalam penyusunan dokumen ini. Hal ini diperburuk dengan kurangnya komitmen pimpinan terhadap keterlibatan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses SAKIP. Sedangkan dari aspek **Indikator Hasil yang Diperoleh** menunjukkan efektivitas **Sangat Baik** dengan capaian 100%, dimana seluruh responden (15 orang) sepakat bahwa dokumen SAKIP telah memuat tujuan penyusunan yang jelas, pegawai memahami pentingnya dokumen SAKIP dan merasakan adanya perubahan nyata dalam pelayanan tugas setelah SAKIP diimplementasikan.

### Pembahasan.

Berdasarkan rekapitulasi hasil akhir seluruh indikator, efektivitas penyusunan SAKIP memperoleh skor rata-rata 60%. Meskipun secara akumulatif dikategorikan efektif, namun terdapat beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan : **Analisis Pencapaian Tujuan dan Kendala Teknis** : Penyusunan SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak secara umum telah memenuhi pentahapan pelaksanaan, namun pemanfaatannya belum optimal. Fokus organisasi masih tertahan pada tahap perbaikan administrasi perencanaan dan pengukuran, sehingga aspek komunikasi serta pengembangan konsensus belum berjalan sesuai harapan. **Faktor Penghambat Sumber Daya Manusia** : Rendahnya efektivitas tenaga (15%) menjadi titik lemah utama. Kurangnya pembinaan terhadap SDM disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan rendahnya respon pimpinan Perangkat Daerah untuk hadir secara langsung dalam kegiatan sosialisasi SAKIP. Seringkali, kehadiran dalam pertemuan strategis diwakilkan kepada staf, sehingga internalisasi nilai-nilai akuntabilitas dari pimpinan ke bawahan tidak berjalan optimal.

**Dampak Terhadap Kualitas Pelaporan** : Ketidaksesuaian format penyusunan dan keterlambatan pengumpulan dokumen berdampak langsung pada hasil evaluasi internal oleh Inspektorat. Belum adanya dokumen pohon kinerja (*cascading*) dan belum dipublikasikannya laporan melalui website resmi menjadi catatan yang mempengaruhi penilaian akuntabilitas secara keseluruhan. Meskipun demikian, adanya kesadaran kolektif pegawai (100%) terhadap pentingnya SAKIP menjadi modal dasar yang kuat untuk perbaikan sistem di masa mendatang.

### Simpulan

Penyusunan SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak dilihat dari pencapaian tujuan sudah berjalan, namun belum optimal karena masih terfokus pada perbaikan tahap perencanaan dan

pengukuran. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya respon pimpinan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi serta keterbatasan anggaran untuk pembinaan sumber daya manusia. Peneliti menyarankan perlunya penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) rutin terkait SAKIP bagi pegawai serta penguatan komitmen pimpinan dalam setiap tahapan penyusunan.

### **Daftar Pustaka**

- Ferdince Lunga Nani, dkk, Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Vol. VI, No.01 (Juli 2021).
- Hikmawati, Fenti. (2020), Metodologi Penelitian, Jakarta ; PT. Rajagrafindo Persada.
- Nurcholis, H. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo.
- Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumaatmaja, efektivitas dan akuntabilitas, jurnal progress administrasi publik, vol. 2 No. 2 (November 2022 ), hlm.2.
- Media Online redaksi primarakyat, edisi 02 Oktober 2024. <https://primarakyat.com/kabupaten-fak-fak-raih-penghargaan-akuntabilitas-kinerja-tahun-2024/>